



**PERKEMBANGAN PEMBERIAN KREDIT OLEH UNIT
SIMPAN PINJAM KUD MEKAR UNGARAN DAN
PENGARUHNYA TERHADAP PENGEMBANGAN
UMKM DI UNGARAN TAHUN 1995-2011**

Skripsi

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata-1 dalam Ilmu Sejarah**

Disusun oleh:

**Muhamad Sugiyarto
NIM 13030114130050**

**FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya, Muhamad Sugiyarto, menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi ini adalah asli hasil karya saya sendiri dan karya ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan baik Strata Satu (S1), Strata Dua (S2), maupun Strata Tiga (S3) pada Universitas Diponegoro maupun perguruan tinggi lain.

Semua informasi yang dimuat dalam karya ilmiah ini berasal dari penulis lain baik yang dipublikasikan maupun tidak telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari karya ilmiah/skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya pribadi sebagai penulis.

Semarang, 16 Juli 2018
Penulis,

Muhamad Sugiyarto
NIM 13030114130050

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

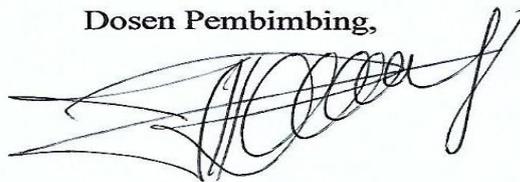
MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka, apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”.

(QS. Al-Insyirah, 5-8)

Dipersembahkan untuk:
Kedua orang tua, kakak,
adik, sahabat, teman,
Jurusan Ilmu Sejarah
FIB UNDIP dan
KUD Mekar Ungaran

**Disetujui,
Dosen Pembimbing,**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Haryono Rinardi', written over a light blue rectangular background.

**Dr. Haryono Rinardi, M.Hum.
NIP. 196703111993031004**

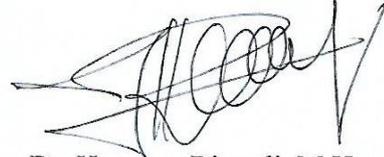
Skripsi dengan judul “Perkembangan Pemberian Kredit oleh Unit Simpan Pinjam KUD Mekar Ungaran dan Pengaruhnya terhadap Pengembangan UMKM di Ungaran Tahun 1995-2011” yang disusun oleh Muhamad Sugiyarto (NIM 13030114130050) telah diterima dan disahkan oleh panitia ujian skripsi Program Strata-1 Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro pada hari Senin, 16 Juli 2018.

Ketua,



Prof. Dr. Sutejo K. Widodo, M.Si.
NIP. 196005151985031004

Anggota I,



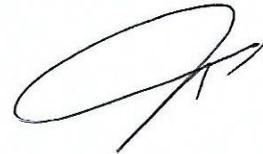
Dr. Haryono Rinardi, M.Hum.
NIP. 196703111993031004

Anggota II,



Dr. Endah Sri Hartatik, M.Hum.
NIP. 196705281991032001

Anggota III,



Dra. Sri Indrahti, M.Hum.
NIP. 196602151991032001

Mengesahkan,
Dekan



Dr. Redyanto Noor, M. Hum.
NIP. 195903071986031002

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perkembangan Pemberian Kredit oleh Unit Simpan Pinjam KUD Mekar Ungaran Tahun 1995-2011”. Selain didasarkan pada pentingnya penulisan mengenai sejarah pemberian kredit, pemilihan tema ini juga dilakukan karena penulis menaruh minat terhadap kajian sosial ekonomi yang berperan besar terhadap aspek pembangunan kesejahteraan masyarakat di negara berkembang, khususnya Indonesia yang masih memiliki banyak permasalahan di bidang sosial ekonomi yang belum terselesaikan dan perlu mendapatkan perhatian yang besar guna mencari solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Lebih lanjut, skripsi ini disusun untuk menempuh ujian akhir Program Strata-1 pada Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro.

Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih atas bantuan, bimbingan, dan petunjuk, baik berupa material maupun spiritual kepada yang terhormat: Dr. Redyanto Noor, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro dan Dr. Dhanang Respati Puguh, M.Hum., selaku Ketua Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, yang berkenan memberikan izin dan kemudahan bagi penulis dalam penulisan skripsi ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Dr. Haryono Rinardi, M.Hum., selaku dosen pembimbing yang dengan sabar memberikan bekal keilmuan, pengarahan, dan bimbingan selama penulis menyusun skripsi ini. Terima kasih juga kepada Dr. Agustinus Supriyono, M.A., selaku dosen wali yang dengan sabar telah memberikan perhatian terhadap perkembangan akademik penulis. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada segenap dosen penguji: Prof. Dr. Sutejo K. Widodo, M.Si., Dr. Endah Sri Hartatik, M.Hum., Dra. Sri Indrahti, M.Hum., yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun bagi skripsi ini.

Terima kasih penulis haturkan kepada segenap pengajar Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro yang tidak dapat penulis

sebutkan satu per satu atas bekal ilmu pengetahuan yang telah diberikan. Terima kasih juga penulis haturkan untuk segenap staf administrasi Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro yang telah memberikan pelayanan yang maksimal.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua yang hebat, Basri dan Sopiah, serta kakak dan adik-adik penulis yang telah memberikan bantuan moral maupun spiritual sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada para sahabat di Departemen Sejarah yang sangat luar biasa memberikan dukungan dan bantuan selama berada di lingkungan Departemen Sejarah.

Skripsi ini pada hakikatnya masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangan baik dalam hal tata tulis maupun substansi, sehingga kritik dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan. Oleh karena itu, meskipun skripsi ini jauh dari kesempurnaan, semoga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 16 Juli 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR SINGKATAN	x
DAFTAR ISTILAH	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
INTISARI	xvii
SUMMARY	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang dan Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup	7
C. Tujuan Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Kerangka Pemikiran	13
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Penulisan	23
BAB II GAMBARAN UMUM KUD MEKAR UNGARAN	24
A. Perkembangan KUD Mekar Ungaran	24
B. Wilayah Kerja KUD Mekar Ungaran	31
C. Jenis-Jenis Usaha KUD Mekar	36
BAB III DINAMIKA KREDIT USP KUD MEKAR UNGARAN	47
A. Tujuan dan Fungsi Kredit USP KUD Mekar Ungaran	47
B. Syarat dan Ketentuan Kredit USP KUD Mekar Ungaran	50
C. Permodalan dalam Penyaluran Kredit USP KUD Mekar Ungaran	54
D. Perkembangan Kredit USP KUD Mekar Ungaran	60
BAB IV PENGARUH KREDIT USP KUD MEKAR UNGARAN TERHADAP PENGEMBANGAN UMKM DI UNGARAN	69
A. Jenis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	69
B. Manfaat Kredit USP KUD Mekar Ungaran	71
C. Kendala dalam Pengembangan UMKM	99
D. Upaya Pemerintah dalam Pengembangan UMKM	101

BAB V	SIMPULAN	104
DAFTAR PUSTAKA		107
DAFTAR INFORMAN		114
LAMPIRAN		117

DAFTAR SINGKATAN*

AD	:	Anggaran Dasar
ART	:	Anggaran Rumah Tangga
Bappenas	:	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BH	:	Badan Hukum
BRI	:	Bank Rakyat Indonesia
BPD	:	Bank Pembangunan Daerah
BPKB	:	Buku Pemilik Kendaraan Bermotor
Bukopin	:	Bank Umum Koperasi Indonesia
BUUD	:	Badan Usaha Unit Desa
FH	:	<i>Friesian Holstein</i>
IB	:	Inseminasi Buatan
Inpres	:	Instruksi Presiden
KCK	:	Kredit Candak Kulak
KCL	:	<i>Kalium Chloride</i>
Kemenkop	:	Kementerian Koperasi
KK	:	Kartu Keluarga
Kkop	:	Kredit kepada Koperasi
KKPA	:	Kredit Koperasi Primer Anggota
KPKM	:	Kredit Pengusaha Kecil dan Menengah
KLBI	:	Kredit Likuiditas Bank Indonesia
KTP	:	Kartu Tanda Penduduk
KUD	:	Koperasi Unit Desa
KUT	:	Kredit Usaha Tani
Nasakom	:	Nasional, Agama, dan Komunis
NPk	:	<i>Nitrogen Phospate Kalium</i>
PP	:	Peraturan Pemerintah
PTPN	:	Perseroan Terbatas Perkebunan Nasional

*Pengertian dalam daftar istilah ini disusun berdasar pada pendapat para ahli dalam kamus, referensi, dan pendapat pribadi.

RAT	:	Rapat Anggota Tahunan
Saprodi	:	Sarana Produksi Padi
Sapronak	:	Sarana Produksi Ternak
SP	:	<i>Super Phospate</i>
TSP	:	<i>Triple Super Phosphate</i>
TTG	:	Teknologi Tepat Guna
UKM	:	Usaha Kecil dan Menengah
UMKM	:	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
USP	:	Unit Simpan Pinjam
UU	:	Undang-Undang
UUDS	:	Undang-Undang Dasar Sementara
Waserda	:	Warung Serba Ada
Wilud	:	Wilayah Unit Desa
WNI	:	Warga Negara Indonesia
ZA	:	<i>Zwavelzure Ammoniak</i>

DAFTAR ISTILAH

Agribisnis	: Kegiatan usaha atau bisnis di sektor pertanian.
Agunan	: Jaminan atas harta kekayaan peminjam sebagai jaminan kredit.
Debitur	: Peminjam kredit/sejumlah uang di USP KUD Mekar.
Diversifikasi	: Penganekaragaman/penambahan jenis sektor usaha yang dilakukan oleh penerima kredit USP KUD Mekar.
Fluktuatif	: Kondisi pasang-surut/naik turun dalam penyaluran kredit USP KUD Mekar.
<i>Friesian Holstein</i>	: Jenis sapi perah yang berasal dari Belanda dan memiliki sifat jinak dan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan baru.
Toko Kelontong	: Suatu toko kecil atau warung kecil yang umumnya mudah diakses oleh umum dan bersifat konvensional atau tradisional, serta menjual barang-barang keperluan sehari-hari.
Kreditur	: Petugas USP KUD Mekar yang memberikan kredit kepada nasabah/anggota KUD Mekar Ungaran.
<i>Linkage Program</i>	: Hubungan kerja sama antara Bank Umum (BRI/BPD) dengan Koperasi dalam upaya pemberdayaan UMKM melalui akses pinjaman dana bergulir yang berasal dari Kementerian Koperasi dan UKM.
Otonomi	: Hak/wewenang daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundangan-perundangan.
Palawija	: Tanaman kedua setelah tanaman pokok (padi) yang biasa ditanam di sawah atau ladang, seperti jagung, ketela, kacang, dan lain-lain.

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar:		
2.1	Struktur Organisasi KUD Mekar Ungaran	27
4.1	Sapi <i>Friesian Holstein</i> Milik Peternak Sapi Perah di Desa Kalongan	77
4.2	Kondisi Usaha Warung Sembako Pak Marsidi di Kelurahan Genuk	87

DAFTAR TABEL

	Halaman	
Tabel:		
2.1	Susunan Pengurus KUD Mekar Ungaran Periode 2002-2006	28
2.2	Susunan Pengawas KUD Mekar Periode 2002-2006	28
2.3	Susunan Karyawan KUD Mekar Ungaran Periode 2002-2006	29
2.4	Perkembangan Anggota KUD Mekar Ungaran Tahun 1995-2011	30
2.5	Penggunaan Lahan di tiap desa/kelurahan di Kecamatan Ungaran Barat Tahun 2010	34
2.6	Penggunaan Lahan di tiap desa/kelurahan di Kecamatan Ungaran Barat Tahun 2010	35
2.7	Perkembangan SHU KUD Mekar Ungaran Tahun 1995-2011	45
3.1	Perkembangan Modal Sendiri	56
3.2	Permodalan dari Luar	58
3.3	Jumlah Pemberian Kredit oleh USP KUD Mekar	62
4.1	Pendapatan sebelum dan setelah mendapatkan kredit sapi perah	81
4.2	Penyaluran Kredit Tiap Sektor Usaha 1995-2011	88
4.3	Jumlah UMKM yang merupakan nasabah USP KUD Mekar Ungaran	91
4.4	Jumlah UMKM yang memanfaatkan kredit di tiap desa/ kelurahan di Kecamatan Ungaran Tahun 2001-2004	94
4.5	Jumlah unit UMKM yang memanfaatkan kredit tiap desa/kelurahan di Ungaran Timur dan Ungaran Barat	96

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran	
A. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi	118
B. Peta Kecamatan Ungaran Timur	137
C. Peta Kecamatan Ungaran Barat	138

RINGKASAN

Skripsi dengan judul “Perkembangan Pemberian Kredit oleh Unit Simpan Pinjam (USP) KUD Mekar Ungaran dan Pengaruhnya terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Ungaran Tahun 1995-2011” menggunakan metode sejarah dalam penulisannya. Permasalahan utama yang diajukan adalah bagaimana hubungan antara perkembangan pemberian kredit oleh Unit Simpan Pinjam (USP) KUD Mekar Ungaran dan perkembangan UMKM yang memanfaatkannya. Penulisan skripsi ini menggunakan sumber sejarah yang dapat dikategorikan menjadi dua macam, yaitu sumber primer, baik tertulis maupun lisan dan sumber sekunder.

Pemberian kredit oleh USP KUD Mekar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Kredit USP KUD Mekar telah memberikan manfaat terhadap pengembangan UMKM. Persyaratan mudah dalam pengajuan kredit menjadikan kredit USP KUD Mekar dipilih oleh pelaku UMKM dan banyak diserap oleh berbagai sektor UMKM, seperti sektor pertanian, peternakan sapi perah, dan perdagangan. Sektor UMKM yang paling banyak memperoleh pinjaman kredit USP KUD Mekar selama periode 1995-2011 adalah perdagangan. Sektor tersebut juga menjadi sektor yang paling berhasil dan berkembang dibandingkan sektor pertanian dan peternakan sapi perah. Hal itu dikarenakan sektor perdagangan memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi. Artinya sektor tersebut tidak terpengaruh terhadap perubahan lingkungan, mampu memanfaatkan lahan sempit, para pelaku usaha tidak perlu memerlukan keterampilan khusus dalam memulai usaha. Mereka hanya dituntut untuk menjual dan mendapatkan barang dagangan dengan harga “miring”.

Pemberian Kredit USP KUD Mekar pada periode 1995-2011 telah mampu menjangkau para pelaku UMKM di setiap desa/kelurahan baik di Kecamatan Ungaran Timur maupun Ungaran Barat. Dengan kondisi itu, USP KUD Mekar dapat dikatakan telah berhasil sebagai lembaga kredit mikro yang berperan dalam pembiayaan untuk pengembangan UMKM di wilayah kerjanya.

SUMMARY

This thesis entitled “Development of Credit Giving by Savings and Loans Unit of Village Unit Cooperative “Mekar” Ungaran and Its Influence on the Development of Micro, Small, and Medium Enterprises sector from 1995 until 2011 used historical method in process of its writing. The main Problem that proposed is how relation among development of credit giving by Saving and Loans Unit of Village Unit Cooperative “Mekar” and development of Micro, Small, and Medium Enterprises that earned the credit. The historical source that used to this thesis writing categorised being two kinds, namely written or oral primary and secondary source.

The credit giving by Saving and Loans Unit Village Unit Cooperative “Mekar” based on Government Regulation Number 9 Year 1995 about saving and loaning effort. Credit of Savings and Loans Unit of Village Unit Cooperative “Mekar” Ungaran has given benefit for developing of Micro, Small, and Medium Enterprises. Easy requirement made this credit is chosen by enterprisers and absorbed by every sector, such as agriculture, Dairy farming, and trading sector. The trading sector became the highest sector that earned the loan along period 1995-2011. The condition due to trading sector has high flexibility, such as not influenced by environtmental change, to be able taking advantage narrow place/land, and no need special skill for every enterpriser. They just demanded to sold and earned the trading goods with “low” price.

The credit giving by Saving and Loans Unit Village Unit Cooperative “Mekar” in 1995-2011 has reached the enterprisers in every village both East Ungaran or West Ungaran. With that condition, Savings and Loans Unit of Village Unit Cooperative “Mekar” Ungaran can be assumed successful as institution of micro credit that has role in financing for developing of Micro, Small, and Medium Enterprises.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Permasalahan

Persoalan di bidang sosial yang tengah dihadapi oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia adalah tingginya kepadatan penduduk. Hal itu tidak diimbangi dengan laju pertumbuhan ekonomi yang baik, sehingga menimbulkan kemiskinan. Berdasarkan data yang dikeluarkan Bank Dunia memperkirakan bahwa sekitar 67 persen penduduk pedesaan di Indonesia berada di bawah garis kemiskinan pada tahun 1970. Hasil sensus penduduk tahun 1980 menunjukkan sekitar 80 persen angkatan kerja Indonesia berada di daerah pedesaan. Jumlah itu menunjukkan bahwa adanya masalah cukup serius dalam hal kesempatan kerja, mengingat lapangan pekerjaan masih bertumpu pada sektor pertanian, sedangkan lahan untuk sektor pertanian semakin terbatas jumlahnya.² Perubahan itu telah memperkecil kemungkinan buruh tani untuk melibatkan diri dalam kegiatan pertanian. Adanya tekanan penduduk terhadap tanah diikuti dengan terbatasnya kesempatan kerja di luar sektor pertanian mendorong penurunan tingkat upah. Hal itu menimbulkan masalah ketenagakerjaan hingga muncul masalah pengangguran dan kemiskinan di pedesaan.³ Berdasar perspektif ekonomi kemiskinan bersumber dari tingkat pengangguran yang tinggi. Hal itu dikaitkan dengan ketidaktersediaan peluang pekerjaan, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan penduduk dalam memanfaatkan peluang serta potensi yang ada.⁴

Ketimpangan pembangunan perlu mendapatkan perhatian maksimal. Realitas pembangunan ekonomi Indonesia masih menghadapi persoalan

²Tadjuddin Noer Effendi, *Masalah Ketenagakerjaan Di Pedesaan Dan Strategi Penanganannya* (Yogyakarta: Dian Desa, 1983), hlm. 1.

³Faisal Kasryno, *Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja Pertanian dan Tingkah Upah* (Bogor: SDP-SAE, 1983), hlm. 22.

⁴Ahmad Shukri Mohammad Nain dan Rosman Mohammad Yusoff, *Konsep, Teori, Dimensi, dan Isu Pembangunan* (Johor Bahru: Universiti Teknologi Malaysia, 2003), hlm. 198.

ketimpangan, baik dalam antargolongan penduduk maupun antarwilayah. Sumber ketimpangan pembangunan ini berawal dari kesalahan desain kebijakan pembangunan yang terlalu berorientasi pada pertumbuhan, tanpa memikirkan desain kebijakan yang mampu menghasilkan pemerataan. Dalam konteks implementasi di era otonomi daerah, setiap daerah baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga ke tingkat lebih sempit lagi membutuhkan kreasi, inovasi dalam menciptakan kinerja pembangunan. Dalam hal ini, diperlukan pilar-pilar pembangunan dalam mencapai visi-dan misi yang telah direncanakan. Salah satu pilar pembangunan yang perlu diperhatikan yaitu ekonomi kerakyatan yang oleh sebagian pihak seringkali diartikan sebagai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).⁵

Pengalaman krisis moneter yang pernah melanda perekonomian Indonesia pada periode 1997-1998, telah menyadarkan pemerintah akan pentingnya pembangunan sektor UMKM, karena sektor usaha itu mampu berdiri kokoh dan tidak terpengaruh dengan badai krisis.

Pada sisi lainnya, pemerintah menyadari bahwa salah satu hambatan UMKM adalah rendahnya modal dan akses pemasaran. Permodalan masih menjadi kendala terbesar bagi para pelaku UMKM untuk mengembangkan diri. Bersamaan dengan itu, UMKM karena keterbatasannya sering kali kesulitan untuk mendapatkan akses pasar, sehingga produk yang dihasilkan sulit untuk masuk ke pasar. Dalam hal permodalan UMKM juga mengalami kesulitan untuk mendapat kredit perbankan, mereka kesulitan melengkapi persyaratan administrasi ditambah nilai pinjamannya juga terbatas.⁶ Keadaan itu adalah situasi yang ironis karena setelah masa krisis ekonomi 1998, UMKM merupakan salah satu tokoh penting

⁵Muslim Kasim, *Karakteristik Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya (Studi Kasus: Padang Pariaman)* (Jakarta: Indomedia Global, 2006), hlm. 126-133.

⁶Saugi Riyandi, "Masalah Modal Dinilai Jadi Kendala Utama Pengusaha UMKM" (<https://www.jawapos.com/>, diunduh pada 3 Maret 2018).

dalam pembangunan. UMKM bahkan dianggap sebagai motor penggerak perekonomian nasional yang sesungguhnya.⁷

Terkait dengan kondisi itu, dibutuhkan lembaga yang mampu membantu permodalan UMKM tanpa persyaratan yang rumit. Dalam arti dibutuhkan lembaga yang membantu menyediakan kredit mudah bagi UMKM guna mengatasi persoalan permodalannya. Dengan kondisi itu, kehadiran Lembaga Kredit Mikro (LKM) memiliki peran penting bagi aktivitas perekonomian, khususnya dalam pembiayaan sektor UMKM. Hal itu disebabkan LKM mampu menghimpun dana dan menyalurkan kembali kepada masyarakat, tanpa memerlukan persyaratan administrasi yang rumit. LKM biasanya berupa Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi Unit Desa (KUD), Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), Baitul Mal Wattamil (BMT), dan atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).⁸ LKM dari segi jumlah penyaluran kredit, masih belum mampu mengalahkan lembaga perbankan formal. Akan tetapi, nominal pembiayaan UMKM melalui lembaga perbankan formal masih terbatas jumlahnya dan belum mampu menjangkau pelaku UMKM sampai ke pedalaman/pelosok desa. Oleh karena itu, salah satu program pembangunan yang dikembangkan pemerintah adalah membuka akses pembiayaan UMKM melalui lembaga koperasi secara lebih luas. Program pembangunan itu, yaitu dengan melibatkan Koperasi Unit Desa (KUD) sebagai lembaga perkreditan bagi pelaku UMKM. Namun demikian, lembaga itu sering kali menemui berbagai kendala di samping lemahnya manajemen kelembagaan dan kapabilitas sumber daya manusianya, juga lemah dalam aspek permodalan sebagai bagian penting bagi kelancaran usaha dan kegiatannya.

⁷Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Majalah ASEAN Edisi 3: Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-23 ASEAN dan KTT terkait Lainnya* (Jakarta: Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, 2013), hlm. 52.

⁸Endi Sarwoko, "Analisis Peranan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam dalam Upaya Pengembangan UMKM di Kabupaten Malang" (Laporan Penelitian Dosen pada Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Kanjuruhan Malang, 2009), hlm. 173.

Pemerintah menyadari pentingnya upaya pemberdayaan koperasi dan UMKM sebagai pilar pembangunan nasional. Pemberdayaan itu dengan jalan memperkuat aspek permodalan koperasi dan membuka akses pembiayaan UMKM oleh koperasi. Hal itu sebagai langkah strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian sebagian besar rakyat Indonesia. Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.⁹ Kebijakan itu ditempuh dengan mengoperasikan, mengembangkan, dan melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau Unit Simpan Pinjam (USP) KUD secara otonom (terpisah dari segala kegiatan usaha lain). Tujuan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi adalah menghimpun dana dari anggota dan menyalurkan kembali kepada anggota yang membutuhkan pinjaman (kredit) untuk pembiayaan UMKM. Kegiatan itu juga bertujuan untuk mendidik anggota koperasi agar hidup berhemat dan menambah pengetahuan tentang perkoperasian serta berusaha mencegah anggotanya terlibat dalam jeratan kaum lintah darat ketika mereka memerlukan sejumlah modal. Kegiatan tersebut ditempuh dengan jalan menggiatkan tabungan dan mengatur pemberian pinjaman uang (kredit) dengan bunga yang relatif ringan dan syarat yang mudah. Dalam pemberian pinjaman, USP memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman.

Salah satu lembaga perkreditan mikro yang menyediakan pinjaman kredit kepada para pengusaha kecil di Ungaran adalah USP KUD Mekar Ungaran. Pada tahun 1995 KUD Mekar Ungaran melaksanakan usaha simpan pinjam secara otonom melalui USP. USP KUD Mekar membuka akses dan layanan untuk pemenuhan permodalan usaha bagi anggota KUD Mekar sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Kegiatan tersebut menghimpun dana dari anggota dan menyalurkannya kembali untuk membantu anggota dalam meningkatkan

⁹Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

pendapatan dan kesejahteraan dengan pemberian kredit untuk kegiatan-kegiatan produktif. Modal untuk penyaluran pinjaman (kredit) berasal dari simpanan-simpanan anggota yang berupa simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Simpanan-simpanan itu dihimpun dan dikelola sebagai modal dari dalam (modal sendiri). Modal itu tidak boleh berkurang dan harus terus ditingkatkan. Selain itu, terdapat juga modal penyertaan atau modal dari luar berupa dana bergulir atau pinjaman dari pihak ketiga, baik dari Kementerian Koperasi dan UKM maupun dari Lembaga Keuangan lain kepada USP KUD Mekar.

Skim kredit yang ditawarkan oleh USP KUD Mekar menggunakan pendekatan pengembangan ekonomi masyarakat desa dengan memperkuat aspek permodalan untuk pembiayaan berbagai kegiatan usaha yang produktif. Dengan cara itu, program kredit tersebut diharapkan dapat merangsang iklim berusaha dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Pada akhirnya, program kredit itu dapat menciptakan dan menumbuhkan UMKM untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran di wilayah Ungaran khususnya.

Skim kredit USP KUD Mekar menjadi salah satu program perkreditan yang cocok untuk dikembangkan, karena skim kredit ini dianggap mampu bertahan dan mandiri. Hal itu dikarenakan, sistem permodalan USP dalam rangka pembiayaan UMKM dapat dihasilkan dari tabungan anggota tanpa adanya ketergantungan dari pihak luar.

Pada periode 1995-2000, penyaluran kredit USP KUD Mekar masih dilakukan secara mandiri dan belum ada keterlibatan dari pihak pemerintah maupun lembaga keuangan lain dalam hal bantuan pendanaan untuk pembiayaan UMKM.

Perkembangan baru muncul pada tahun 2001, saat itu USP KUD Mekar mendapatkan sokongan dana pinjaman dari Kementerian Koperasi dan UKM. Tujuannya adalah untuk membantu akses dan layanan pembiayaan bagi usaha produktif anggota (pelaku UMKM) di Ungaran sebesar Rp 100 juta,-. Dana Pinjaman tersebut berasal dari dana bergulir yang bersumber dari Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM). Dalam penyaluran dana bergulir tersebut, Bank Bukopin ditetapkan sebagai bank penyalur dana kepada USP KUD Mekar Ungaran.

Tindak lanjutnya, Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2007 kembali menggulirkan dana pinjaman sebesar Rp 100 juta,- kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya, dana bergulir tersebut disalurkan oleh Pemerintah Provinsi melalui akses layanan Bank BPD Jateng kepada USP KUD Mekar untuk dijadikan sebagai dana investasi dan pemupukkan modal, khususnya untuk pembiayaan sektor riil (UMKM) di Ungaran.

Perkembangan selanjutnya pada periode 2008-2011, penyaluran skim kredit kembali dilakukan secara mandiri oleh pihak USP KUD Mekar Ungaran. Hal itu dikarenakan dari segi permodalan USP KUD Mekar semakin kuat dalam kegiatan penyaluran skim kredit. Tonggaknya pada tahun 2011, melalui Rapat Anggota Tahunan USP KUD Mekar mengambil kebijakan untuk menaikkan simpanan-simpanan anggota untuk memperkuat segi permodalan. Pada akhirnya, simpanan-simpanan itu dapat disalurkan kembali kepada anggota yang membutuhkan bantuan untuk mengembangkan usahanya.

Penyaluran kredit USP KUD Mekar untuk pembiayaan UMKM hingga tahun 2011 telah mencapai nominal Rp 16,4 miliar. Jumlah nominal tersebut telah dimanfaatkan oleh 8575 unit UMKM di wilayah Ungaran.¹⁰ Jumlah penyaluran kredit itu telah memberikan manfaat terhadap perkembangan UMKM yang memanfaatkan skim kredit. Akan tetapi, dalam kegiatan penyaluran skim kredit kerap kali mengalami fluktuasi. Hal itu disebabkan oleh kondisi internal UMKM yang belum memenuhi prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh USP KUD Mekar (kreditur), sedangkan pihak USP KUD Mekar menganut prinsip kehati-hatian untuk menghindari adanya kredit bermasalah (kredit macet). Hal itu jelas akan berdampak pada kegiatan penyaluran kredit dan perkembangan UMKM.

Perkembangan pemberian kredit terhadap pelaku UMKM tidak terlepas dari berbagai fluktuasi. Oleh karena itu, menarik untuk diulas bagaimana peran dan perkembangan pemberian kredit untuk pembiayaan UMKM yang disalurkan USP KUD Mekar Ungaran dan keterkaitan antara kredit USP KUD Mekar dengan

¹⁰Laporan Tahunan KUD Mekar Ungaran tahun 1995-2011.

perkembangan UMKM. Permasalahan utama yang menjadi fokus kajian penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana hubungan antara perkembangan kredit USP KUD Mekar Ungaran dan perkembangan sektor UMKM yang memanfaatkannya.

Dengan permasalahan seperti itu, maka penelitian ini harus menjawab beberapa pertanyaan penelitian. Pertama, bagaimana perkembangan penyaluran kredit oleh USP KUD Mekar Ungaran; Kedua, bagaimana perkembangan permodalan USP KUD Mekar Ungaran; Ketiga, bagaimana syarat dan ketentuan skim kredit USP KUD Mekar; Keempat, bagaimana pengaruh skim kredit USP KUD Mekar terhadap para debiturnya; Kelima, bagaimana manfaat kredit USP KUD Mekar terhadap dunia usaha (UMKM) di Ungaran; dan Keenam, sektor usaha apa saja yang memanfaatkan skim kredit USP KUD Mekar Ungaran.

B. Ruang Lingkup

Pembatasan ruang lingkup dalam penelitian sejarah diperlukan agar penelitian dapat lebih terfokus dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara empiris dan metodologis.¹¹ Penelitian sejarah mengenal tiga ruang lingkup, yakni temporal, spasial, dan keilmuan.

Lingkup temporal penelitian ini adalah antara 1995 sampai dengan 2011. Tahun 1995 dipilih sebagai batas awal kajian dengan alasan bahwa pada tahun itu dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Peraturan itu dikeluarkan agar koperasi melaksanakan dan mengembangkan kegiatan usaha simpan pinjam secara otonom (terpisah dari kegiatan usaha lain), mandiri, dan hanya bergerak pada usaha simpan pinjam. Peraturan itu juga dikeluarkan sebagai bentuk penyempurnaan usaha simpan pinjam yang dirasa kurang berkembang dan belum sepenuhnya fokus pada usaha simpan pinjam. Tujuan utama usaha simpan pinjam berdasarkan Peraturan Pemerintah itu adalah untuk menghimpun dana dari anggota dan menyalurkannya kembali kepada anggota dalam bentuk pinjaman (kredit). Pinjaman dalam bentuk kredit itulah yang nantinya digunakan oleh debitur (anggota/calon anggota) untuk

¹¹Taufik Abdullah, *Sejarah Lokal di Indonesia: Kumpulan Tulisan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985), hlm. 10.

menciptakan, memperluas, dan mengembangkan usaha yang sifatnya produktif (UMKM). Modal untuk penyaluran kredit itu berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela.

Tahun 2011 dipilih sebagai batas akhir kajian karena tahun itu muncul perubahan kebijakan KUD Mekar melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) untuk meningkatkan permodalan USP KUD Mekar. Kebijakan itu diambil sebagai upaya untuk menguatkan dana cadangan usaha simpan pinjam KUD Mekar untuk pembiayaan sektor UMKM. Hal itu sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Dalam hal ini aspek permodalan berupa modal sendiri tidak boleh berkurang jumlahnya dan harus terus ditingkatkan. Oleh karena itu, kebijakan meningkatkan jumlah permodalan dengan jalan menaikkan setoran simpanan pokok dan wajib sangat diperlukan untuk pembiayaan dan upaya pengembangan UMKM nasabah USP KUD Mekar. Tahun 2011 juga dijadikan sebagai batasan akhir dalam skripsi ini karena pada tahun itu mulai berkurangnya nasabah USP KUD Mekar yang meminjam kredit dikarenakan telah mencapai kemajuan dalam usahanya.

Lingkup spasial dalam skripsi ini adalah lingkup lokal. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa pemberian kredit oleh KUD Mekar lebih difokuskan pada wilayah kerja KUD Mekar Ungaran yang meliputi beberapa desa dan kelurahan yang ada di Ungaran, yaitu antara lain Desa Nyatyono, Gogik, Lerep, Kalisidi, Keji, Branjang, Leyangan, Kalongan, Beji, Kalikayen, dan Mluweh, sedangkan kelurahannya meliputi Kelurahan Ungaran, Bandarjo, Susukan, Kalirejo, Sidomulyo, Langensari, Gedanganak, Genuk, dan Candirejo.

Sementara itu, lingkup keilmuan skripsi ini adalah sejarah sosial ekonomi. Hal ini dikarenakan penelitian ini mengulas tentang perkembangan pemberian kredit Oleh USP KUD Mekar Ungaran terhadap sektor UMKM yang bertumpu pada masalah ekonomi. Topik penelitian ini menyangkut kredit yang diperlukan bagi anggota KUD Mekar dalam upaya pengembangan UMKM, baik sebagai investasi maupun modal kerja. Skripsi ini juga membahas mengenai pengaruh USP KUD Mekar Ungaran dalam memberi pinjaman bagi anggota sebagai pelaku UMKM melalui skim kredit USP.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan batasan ruang lingkup di atas, di dalam penelitian ini dikembangkan beberapa tujuan penelitian.

Pertama, merekonstruksi peran KUD Mekar Ungaran dalam menyalurkan bantuan kredit serta hambatan-hambatan yang dihadapinya. Kedua, mendeskripsikan faktor-faktor penyebab terjadinya perkembangan dan fluktuasi dalam pemberian kredit terhadap anggota koperasi oleh KUD Mekar Ungaran. Ketiga, mengkaji jenis usaha yang masuk dalam kategori UMKM dan manfaat pemberian kredit terhadap dunia usaha, khususnya unit UMKM di Ungaran sebagai debitur KUD Mekar.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang Kredit yang disalurkan oleh Unit Simpan Pinjam KUD yang berada di bawah naungan Departemen Koperasi telah beberapa kali dilakukan dan diajukan sebagai acuan, serta telaah dalam skripsi ini. Buku pertama, adalah terbitan Departemen Koperasi melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Koperasi, yang berjudul *Penelitian Pola Pengembangan Bank Koperasi Nasional*.¹² Buku ini membahas mengenai Koperasi Unit Desa yang telah dikelola dengan baik dan diberi permodalan oleh Departemen Koperasi untuk melayani kredit kecil bagi kegiatan produktif rakyat pedesaan, diharapkan mampu meningkatkan pendapatan rakyat pedesaan dan membantu pemerataan pendapatan; membantu pengembangan produksi dan pemasaran dari komoditi-komoditi penting yang diperlukan oleh sektor pedesaan; meningkatkan partisipasi KUD-KUD dalam pengembangan usaha bagi pedagang kecil, usaha pertanian dan peternakan, warung-warung dan lain sebagainya. Buku ini memberikan pengetahuan dan gambaran mengenai pola perkreditan yang merupakan program yang baik untuk mengangkat pedagang kecil yang tidak mampu, warung-warung, dan bidang usaha lain.

¹²Badan Penelitian dan Pengembangan Koperasi, *Penelitian Pola Pengembangan Bank Koperasi Nasional* (Jakarta: Departemen Koperasi, 2011), hlm. 32.

Pustaka kedua adalah laporan penelitian berjudul “Strategi Pemberdayaan UMKM Menghadapi Pasar Bebas Asean” yang disusun oleh Sudaryanto, Ragimun, dan Rahma Rina Wijayanti.¹³ Pustaka tersebut dapat dijadikan referensi untuk memahami permasalahan yang dihadapi dalam upaya pemberdayaan UMKM dan strategi atau kebijakan yang dapat diambil untuk membangun UMKM yang berdaya saing dan produktif dalam menghadapi pasar bebas ASEAN guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi yang adil dan merata. Dalam pustaka tersebut dijelaskan pula permasalahan yang menghambat tumbuh kembangnya UMKM, antara lain berkaitan dengan iklim usaha yang kurang kondusif yang disebabkan oleh besarnya biaya transaksi akibat ketidakjelasan mengenai prosedur perizinan, rendahnya produktivitas UMKM yang disebabkan oleh rendahnya kualitas dan kompetensi SDM, sulitnya mendapatkan akses dalam pemasaran, keterbatasan modal, infrastruktur, dan penguasaan teknologi yang berdampak pada sulitnya meningkatkan nilai tambah usaha sehingga menyebabkan rendahnya tingkat pendapatan. Pustaka ini juga menjelaskan kebijakan pemerintah dalam upaya pemberdayaan UMKM, seperti memberikan berbagai fasilitas bantuan antara lain; melalui penyaluran dana perkreditan, penyediaan akses informasi pemasaran, pelatihan terhadap LKM melalui *capacity bulding*, dan pengembangan *information technology* (IT).

Pustaka ketiga, adalah skripsi yang berjudul “Koperasi Unit Desa Mekar Ungaran Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Dan Berbagai Hambatannya” yang disusun oleh Suyanto.¹⁴ Laporan penelitian tersebut merupakan hasil kajian pada Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Semarang pada tahun 2007. Sebagaimana yang termuat dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1978 dijelaskan bahwa Koperasi Unit Desa adalah suatu

¹³Sudaryanto, dkk. “Strategi Pemberdayaan UMKM Menghadapi Pasar Bebas Asean” (Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2009), hlm. 24-25.

¹⁴Suyanto, “Koperasi Unit Desa Mekar Ungaran Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Dan Berbagai Hambatannya” (Skripsi pada Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2007), hlm. 85.

organisasi ekonomi yang berwatak sosial dan merupakan wadah dalam pengembangan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan yang diseleggarakan oleh dan untuk masyarakat itu sendiri. Dalam penelitian ini dijelaskan bagaimana peran KUD dalam memberikan berbagai pelayanan di bidang ekonomi seperti penyaluran kredit kepada para anggotanya. Dijelaskan pula peran KUD Mekar Ungaran melalui Unit Simpan Pinjam melaksanakan usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota koperasi secara teratur dan terus-menerus, kemudian dipinjamkan atau disalurkan kepada para anggota dengan tujuan membantu para anggota yang sedang kesulitan dalam keuangan atau pengembangan usaha karena ketiadaan modal. Meskipun demikian, kajian dalam penelitian skripsi ini lebih banyak berbicara mengenai peran KUD Mekar dalam meningkatkan kesejahteraan anggota melalui unit-unit usaha yang masih dimiliki dan tidak melihat konteks perkembangan atau kesejarahan. Di samping itu, penelitian skripsi ini juga tidak memberikan penjelasan secara utuh dan mendetail tentang unit-unit usaha dan perkembangannya, terutama perkembangan pemberian kredit oleh unit simpan pinjam KUD Mekar.

Pustaka keempat adalah laporan penelitian berjudul “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pasar Kamboja” yang disusun oleh Ida Ayu Utami Prabandari, dkk.¹⁵ Laporan tersebut merupakan hasil penelitian pada Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Udayana pada tahun 2017. Laporan itu menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya pasal 33 ayat (1) menyatakan perekonomian Indonesia disusun berdasar pada usaha bersama berlandaskan asas kekeluargaan. Dijelaskan bagaimana koperasi sebagai badan usaha yang dinilai sesuai dengan karakter masyarakat khususnya di pedesaan. Dijelaskan pula mengenai kinerja Koperasi Simpan Pinjam yang berdasar pada

¹⁵Ida Ayu Utami Prabandari, dkk., “Implementasi Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pasar Kamboja” (Laporan Penelitian pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017), hlm. 2.

implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, di mana tugasnya menghimpun simpanan koperasi dan tabungan koperasi serta memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan anggotanya. Pinjaman sebagai fasilitas yang diberikan KSP ini digunakan anggotanya untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan taraf hidup anggota, maka prosedur dan persyaratan dalam pemberian pinjaman diusahakan sesederhana mungkin tanpa berbelit-belit. Prosedur atau persyaratan pengajuan permohonan pinjaman dilakukan beberapa tahapan, antara lain: 1) tahapan pengajuan permohonan; 2) tahapan penilaian pinjaman; 3) tahapan analisa pinjaman; dan 4) tahapan pengawasan pinjaman. tahapan-tahapan tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya kesulitan pengembalian pinjaman (kredit) oleh anggota. Dijelaskan bahwasanya kegiatan usaha simpan pinjam dinilai sangat membantu masyarakat khususnya anggota untuk memperoleh modal dalam mengembangkan usaha. Anggota koperasi diberikan kemudahan dalam mencari dana atau modal usaha dalam bentuk pinjaman atau kredit. Meskipun pustaka ini tidak memberikan penjelasan secara mendetail mengenai kegiatan penyaluran kredit melalui usaha simpan pinjam dan pengaruhnya terhadap debiturnya/anggota, namun pustaka ini telah memberikan gambaran bagaimana sistem pelaksanaan atau implementasi kegiatan simpan pinjam berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

Berbeda dengan pustaka-pustaka tersebut di atas, skripsi ini fokus pada hubungan antara pemberian skim kredit USP KUD Mekar Ungaran dan perkembangan sektor usaha yang memanfaatkannya di Ungaran yang berlangsung dari 1995 sampai dengan 2011. Melalui eksplanasi mendetail berkaitan dengan perkembangan pemberian kredit USP KUD Mekar dan pengaruhnya terhadap pengembangan UMKM di Ungaran, diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif tentang pemberian kredit dan manfaatnya terhadap debitur serta usaha debiturnya.

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini membahas tentang perkembangan pemberian kredit oleh Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi Unit Desa (KUD) Mekar Ungaran sebagai usaha untuk menyalurkan modal atau dana usaha kepada para anggota di Ungaran Semarang pada 1995-2011.

Kredit berasal dari bahasa Yunani “Credere” yang berarti kepercayaan. Oleh karena itu, dasar dari kredit adalah kepercayaan. Seseorang atau semua badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) di masa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan dapat berupa, uang atau jasa. Kredit-kredit yang disalurkan lembaga keuangan bank atau non bank dapat berupa kegiatan penyediaan uang atau kesepakatan pinjam-meminjam disertai kesepakatan jangka waktu pelunasan pinjaman dengan tingkat bunga yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi kredit dan penerima kredit. Lembaga penyalur kredit yang umumnya dikenal masyarakat yaitu bank, baik bank umum atau bank khusus yang menangani masalah perkreditan. Lembaga lain selain bank yang memiliki peran strategis dalam menangani penyaluran kredit kepada masyarakat yaitu berupa koperasi. Berdasar Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 3 Tentang Perkoperasian. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi dan peran Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tentang Perkoperasian tersebut sebagaimana yang tertera dalam pasal 4 yaitu, a. membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya; b. berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat; c. memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya; d. berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Kredit yang disalurkan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam (USP) KUD merupakan kredit yang diberikan dengan maksud untuk memberi kesempatan kepada para anggota dalam memperoleh bantuan kredit atau pinjaman dengan persyaratan mudah dan bunga yang relatif ringan guna mengembangkan usaha para debiturnya.¹⁶ Pemberian kredit juga dapat memberikan keuntungan dalam bentuk bunga bagi pihak kreditur jika debitur yang diberikan kredit dapat mengembalikan pinjaman yang telah diterima. Selain memiliki tujuan, pemberian kredit juga memiliki fungsi antara lain sebagai berikut.

1. Untuk meningkatkan daya guna uang

Uang yang hanya disimpan tidak akan menghasilkan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit, uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa bagi pihak debitur.

2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

3. Untuk meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan oleh pihak USP dapat digunakan oleh para debitur untuk membeli dan mengolah bahan baku menjadi barang jadi untuk meningkatkan daya guna barang.

4. Meningkatkan peredaran barang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari suatu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi

¹⁶Agustinus Supriyanto, *Tata Kelola Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam: Implementasi Kebijakan Koperasi Simpan Pinjam Terhadap Manajemen Pengelolaan, Keorganisasian atau Permodalan* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2015), hlm. 9-10

Dengan memberikan kredit dapat pula dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kredit dapat pula membantu dalam mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri, sehingga meningkatkan devisa negara.

6. Meningkatkan kegairahan berusaha

Bagi si penerima kredit (debitur) tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi nasabah yang memiliki modal yang pas-pasan.

7. Meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan akan semakin baik terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika suatu kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja, sehingga dapat pula mengurangi pengangguran. Di samping itu, masyarakat sekitar pabrik juga akan dapat meningkatkan pendapatannya dengan membuka warung atau menyewa rumah kontrakkan atau jasa lainnya.¹⁷

USP adalah bagian dari unit usaha suatu koperasi, termasuk di KUD Mekar. USP KUD Mekar beroperasi secara otonom pada tahun 1995 atas dasar Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Berdasarkan peraturan itu USP sebagai unit otonom yang hanya bergerak di bidang usaha simpan pinjam.

Koperasi Unit Desa (KUD) merupakan koperasi yang ditetapkan pemerintah sebagai pelopor dan pusat kegiatan perekonomian di pedesaan. KUD dianggap sebagai jenis koperasi yang paling tepat dikembangkan di Indonesia, karena 80 persen masyarakat Indonesia hidup di pedesaan. Pendirian KUD ini didasarkan pada dua harapan, yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota dan memberikan manfaat pada masyarakat umum. KUD memiliki tugas, tanggung jawab dan wewenang dalam menyusun rencana kerja yang telah diamanatkan oleh rapat anggota tahunan, salah satu rencana kerjanya adalah dalam bidang usaha seperti pemberian kredit/simpan pinjam dengan tujuan; 1. Meningkatkan jumlah nasabah;

¹⁷M. Tohar, *Permodalan dan Perkreditan Koperasi* (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hlm. 90-91.

2. Menambah modal/kredit/simpan pinjam; 3. Mengurangi suku bunga pinjaman; 4. Menertibkan tunggakan-tunggakan cicilan pokok dan bunga simpanan.¹⁸

Koperasi Unit Desa (KUD) Mekar Ungaran merupakan sebuah koperasi yang didirikan pada tahun 1973 atas dasar Inpres Nomor 4 Tahun 1973 Tentang Unit Desa, yang mana sejak awal pendiriannya, bernama Badan Usaha Unit Desa (BUUD) dengan memperoleh status badan hukum No. 8434/811/VI/1973. Tanggal penamaan KUD Mekar tepatnya pada tanggal 31 Agustus 1973.¹⁹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “pengembangan” mengandung arti proses, cara, perbuatan mengembangkan. Pengembangan dalam hal itu berarti suatu upaya atau proses menuju ke arah yang maju, menjadikan luas, berkembang sesuai yang dikehendaki. Kaitannya dengan penelitian ini, pengembangan yang dimaksud diarahkan pada upaya untuk mengembangkan UMKM melalui penyediaan modal usaha/kredit yang diperoleh dari USP KUD Mekar. Pengembangan UMKM menjadi bagian yang sangat penting dalam perekonomian nasional, karena sektor usaha tersebut dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak dan menciptakan pemerataan pendapatan yang adil dan merata. Melihat peran UMKM yang sangat strategis dan potensial, terkadang usaha ini sering kali menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama yang dihadapi pelaku UMKM yaitu keterbatasan modal dalam mengembangkan usahanya.²⁰ Hal itu disebabkan karena kurang tersedianya jangkauan dan akses langsung terhadap layanan dan fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh lembaga

¹⁸Karmila, *Koperasi sebagai Penggerak Perekonomian* (Klaten: Cempaka Putih, 2009), hlm. 15.

¹⁹“Profil dan Perkembangan KUD Mekar Ungaran” (Arsip KUD Mekar Ungaran).

²⁰Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Lampiran Pidato Kenegaraan serta Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 Beserta Nota Keuangannya* (Jakarta: Bappenas, 2008), hlm. 334.

keuangan, sehingga menghambat laju pertumbuhan, perkembangan, dan produktivitas UMKM.²¹

Fokus pengembangan UMKM yang ditekankan dalam penelitian skripsi ini yaitu dengan membuka akses dan layanan pembiayaan melalui LKM. Salah satu LKM yang diperlukan dalam pengembangan UMKM yaitu USP KUD Mekar Ungaran, karena LKM tersebut tidak dapat dipisahkan dalam upaya pemberdayaan UMKM. Hal itu dikarenakan layanan USP KUD Mekar dapat menjangkau akses pembiayaan bagi UMKM yang berada di pedalaman/pelosok-pelosok desa, berbeda dengan lembaga perbankan formal yang masih terbatas dalam menjangkau pelaku UMKM di daerah pedesaan di Wilayah Ungaran. Selain itu, USP KUD Mekar juga memiliki sifat yang berwatak sosial dan gotong royong dalam memajukan usaha dan kesejahteraan anggota, sehingga pengembangan UMKM akan lebih terarah dan termonitor.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjelaskan definisi yang tergolong dalam bisnis UMKM. Pengertian UMKM adalah sebagai berikut. Pertama, Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang-perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang itu. Kedua, Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil. Ketiga, Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

²¹M. Syahirman Yusi “Strategi Pemberdayaan Industri Kecil: Pengaruhnya terhadap Kemandirian Usaha” (Jurnal Ekonomi Bisnis & Akuntansi Ventura, 12 (1), 2009), hlm. 24.

Adapun kriteria UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasal 6 adalah sebagai berikut.

1. Usaha Mikro
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Usaha Kecil
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Usaha Menengah
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

UMKM menjadi kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki peran strategis dan potensial dalam mengatasi permasalahan sosial, seperti kemiskinan dan pengangguran. Peran penting UMKM tersebut tentunya perlu didukung dengan permodalan yang memadai agar mampu berkembang dan bersaing dengan usaha yang relatif besar. Permodalan dalam pembiayaan UMKM salah satunya dapat diakses melalui Unit Simpan Pinjam (USP). USP mampu melayani perkreditan kepada pelaku UMKM terutama di daerah-daerah pedalaman yang jauh dari akses lembaga perbankan. Dengan akses perkreditan kepada pelaku UMKM (anggota/calon anggota) diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan UMKM dan menyerap tenaga kerja untuk mengatasi persoalan kemiskinan dan pengangguran.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk menyusun laporan penelitian ini adalah metode sejarah, yaitu proses menguji dan menganalisis rekaman dan peninggalan masa lampau.²² Metode sejarah mencakup empat langkah, yaitu heuristik (pengumpulan sumber), pengujian sumber (kritik), sintesis, dan penulisan (historiografi).²³

Dalam skripsi berjudul “Perkembangan pemberian Kredit Oleh Unit Simpan Pinjam (USP) KUD Mekar Ungaran dan Pengaruhnya terhadap Pengembangan UMKM di Ungaran Tahun 1995-2011” ini, sumber-sumber yang digunakan berasal dari beberapa lembaga kearsipan dan perpustakaan seperti Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Kantor KUD Mekar Ungaran, Kantor Bappenas, Kantor Departemen Koperasi Kabupaten Semarang, Perpustakaan Suara Merdeka dan Depo Arsip Suara Merdeka, serta Kantor PT Kompas Biro Jawa Tengah.

Sumber sejarah yang digunakan dalam penelitian ini dikategorikan menjadi dua macam, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer dari skripsi ini diperoleh dari depo arsip KUD Mekar Ungaran. Sumber primer tersebut berupa. Pertama, Laporan tahunan KUD Mekar Ungaran yang diterbitkan setiap tahun dan juga sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban kinerja setiap tahunnya. Berdasar laporan tersebut dapat diketahui terdapat kondisi fluktuasi (naik-turun) setiap tahunnya. Laporan itu berisi jumlah kredit atau pinjaman yang diberikan kepada debitur setiap tahunnya, pendapatan bunga, jumlah anggota yang meminjam uang (kredit), simpanan anggota, dan juga bantuan permodalan yang masuk ke KUD Mekar. Laporan tahunan tersebut penting bagi skripsi ini karena dari laporan tersebut dapat dianalisis fluktuasi jumlah kredit yang diberikan dan diterima setiap tahunnya sehingga dapat diketahui rata-rata pemberian dan penerimaan dalam

²²Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah, terjemahan Nugroho Notosusanto* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1983), hlm. 32.

²³Nugroho Notosusanto, *Hakekat Sejarah dan Metode Sejarah* (Jakarta: Mega Book Store, 1984), hlm. 22-23.

kurun waktu enam belas tahun dari 1995 sampai 2011 cenderung meningkat atau menurun. Kedua, Dokumen Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. Peraturan Pemerintah ini penting dalam penulisan skripsi ini, karena dapat dijadikan sebagai dasar pelaksanaan dan pedoman dalam usaha simpan pinjam oleh koperasi yang bertujuan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya kepada anggota koperasi dalam bentuk pinjaman (kredit) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Peraturan itu juga dijadikan sebagai acuan dalam proses awal pelaksanaan usaha simpan pinjam, sebagaimana yang dilaksanakan oleh Unit Simpan Pinjam KUD Mekar pada tahun 1995 dalam rangka memfasilitasi kebutuhan akan uang tunai dalam bentuk pinjaman (kredit) yang ditujukan untuk setiap anggota maupun calon anggota KUD Mekar baik untuk mengembangkan usaha maupun untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Ketiga, data-data publikasi yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah berjudul Kabupaten Semarang dalam Angka dari tahun 1986 hingga 2011. Data publikasi itu berbentuk PDF yang dapat dijadikan acuan untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi di wilayah Ungaran. Keempat, publikasi berjudul Kecamatan Semarang dalam Angka yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang. Buku itu berbentuk PDF yang penting untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi di Ungaran, khususnya mengenai pertumbuhan UMKM. Kelima, Dokumen Surat Kesepakatan Bersama antara Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia dan Bank Indonesia No 10/13 Tahun 2011 Tentang Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Surat Kesepakatan Bersama antara Kementerian Koperasi dan UKM dan Bank Indonesia itu penting bagi skripsi ini karena dalam surat kesepakatan tersebut terdapat usaha-usaha kedua instansi dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Kemenkop dan UKM berperan dalam pelaksanaan teknis di lapangan terkait pemberdayaan koperasi dan UMKM secara langsung, sedangkan Bank Indonesia melaksanakan fungsi terhadap akses pembiayaan pada sektor riil (Koperasi dan UMKM). Selanjutnya yang ketujuh, Dokumen Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pedoman Umum *Linkage Program* antara Bank Umum dengan Koperasi.

Dokumen Peraturan itu dinilai penting sebagai bahan penulisan skripsi, karena di dalamnya berisi upaya-upaya yang ditempuh Kemenkop dan UKM dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi sektor UMKM, antara lain akses pembiayaan dan permodalan bagi pengembangan UMKM. Langkah yang ditempuh Kementerian Koperasi dan UKM tersebut berupa *Linkage Program* antara Kemenkop dan UKM dengan Perbankan sebagai langkah awal membuka akses modal bagi pembiayaan dan permodalan Koperasi dan UMKM.

Selain menggunakan sumber primer tertulis, skripsi ini juga memanfaatkan sumber primer lisan berupa wawancara dengan tokoh atau pelaku sejarah. Wawancara tersebut dilakukan dengan para narasumber yang pernah terlibat dan terkait dengan kredit USP KUD Mekar Ungaran. Narasumber tersebut yaitu, Bapak FA. Ariyadi, beliau menjabat sebagai administrasi umum. Beliau terlibat dalam masalah penyusunan dan pembuatan laporan tahunan KUD Mekar yang menyangkut kredit di Unit Simpan Pinjam KUD Mekar. Oleh karena itu, beliau paham betul seluk-beluk kredit yang disalurkan Unit Simpan Pinjam KUD Mekar; Kedua, Bapak Joko Budiyanto. Beliau adalah Kepala bagian Jasa Unit Simpan Pinjam (USP) yang menangani pemasukan dan penyaluran dana, kredit, dan simpan pinjam dari anggota KUD Mekar. Baik bapak F.A Ariyadi maupun Bapak Joko Budiyanto, keduanya masih menjabat pada bidang tersebut di KUD Mekar Ungaran. Hasil wawancara ini digunakan sebagai pelengkap dan sekaligus pembanding sumber tertulis.²⁴ Dalam hal ini semakin banyak informasi yang dapat dikumpulkan semakin baik pula proses penelitian dan penulisan sejarah.²⁵ Hasil wawancara beberapa tokoh yang representatif diseleksi dan dibanding-bandingkan, sehingga akan diperoleh data yang objektif. Wawancara dilakukan dengan para informan yang dapat dibedakan dalam tiga kategori, yaitu orang-orang yang terlibat langsung dalam peristiwa; orang-orang yang menyaksikan peristiwa tetapi tidak

²⁴Hasil wawancara dapat dikategorikan sebagai sumber primer. Gottschalk, hlm. 35.

²⁵Abdurrahman Suryomihardjo, *Pemahaman Bangsa dan Masalah Historiografi* (Jakarta: Idayu, 1975), hlm. 139.

terlibat langsung dalam peristiwa; dan orang-orang yang tidak terlibat dalam peristiwa, tetapi mendapat keterangan dari orang yang terlibat dalam peristiwa.

Skripsi ini juga menggunakan sumber sekunder sebagai sumber pendukungnya, gunanya untuk memperkuat sumber primer tertulis dan lisan. Sumber sekunder didapat dari hasil riset kepustakaan di perpustakaan nasional Jakarta, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah Semarang, Perpustakaan LIPI, Perpustakaan Universitas Diponegoro dan Perpustakaan Sejarah Universitas Diponegoro untuk menemukan hasil penelitian yang terkait kredit dan koperasi. Sumber sekunder lainnya adalah artikel-artikel yang dimuat dalam majalah dan surat kabar sezaman atau bentuk penerbitan yang lain. Sumber-sumber itu juga berguna untuk melengkapi sumber-sumber primer dalam rangka memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai peristiwa yang diteliti.

Setelah pengumpulan sumber dipandang cukup, tahap berikutnya dilakukan pengujian sumber melalui kritik. Penulisan skripsi ini menggunakan kritik interen untuk memastikan bahwa informasi dalam dokumen itu dapat dipercaya. Kritik interen ditempuh dengan membandingkan informasi satu dengan informasi yang lainnya agar mendapatkan fakta-fakta sejarah yang shahih.

Tahap ketiga adalah kegiatan sintesis terhadap fakta-fakta yang diperoleh dari proses kritik sumber. Fakta-fakta sejarah yang relevan dengan perkembangan pemberian kredit disintesis melalui imajinasi, interpretasi, dan teorisasi untuk mencari hubungan antara satu fakta dan fakta lain dalam kerangka hubungan kronologis dan kausalitas. Dengan demikian, perkembangan sistem kredit di KUD Mekar dapat dieksplanasikan dan selanjutnya dapat dipahami secara bulat dan utuh. Dalam tahap ini penggunaan konsep-konsep dan teori-teori ilmu sosial berguna untuk membantu menjelaskan hubungan antarfakta, yaitu hubungan antara pemberian kredit dan pengaruhnya terhadap dunia usaha di Ungaran.

Tahap keempat adalah penulisan sejarah atau historiografi. Dalam tahap ini fakta-fakta yang disintesis dipaparkan dalam bentuk penulisan sejarah dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar agar dapat dipahami dengan baik oleh para pembaca.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan merupakan tata urutan dari penyusunan tulisan ini yang akan memberikan gambaran secara garis besar mengenai isi yang terkandung dalam tulisan ini. Tulisan ini terbagi atas lima bab, antara lain sebagai berikut;

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang berisi penjelasan tentang latar belakang masalah dan permasalahan, ruang lingkup, tujuan penulisan, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, memuat pembahasan tentang perkembangan KUD Mekar Ungaran secara singkat dan jelas dari awal berdiri hingga akhir dari periodisasi skripsi ini serta latar belakang pendiriannya. Pada bagian ini pertama-tama dikaji perkembangan perkoperasian di Indonesia secara singkat dan jelas dari masa kolonial, hingga batas penelitian skripsi.

Bab III, berisi kajian tentang Kredit pada Unit Simpan Pinjam KUD Mekar. Pada bagian bab ini dijelaskan secara lengkap perkembangan skim kredit tersebut mulai dari tujuan dan fungsi kredit terhadap anggota KUD Mekar dan perkembangan permodalan baik dari dalam maupun luar (perbankan atau instansi lain) untuk penyaluran kredit, serta perkembangan jumlah kredit.

Bab IV, memuat pembahasan tentang pengaruh kredit terhadap pengembangan UMKM di Kecamatan Ungaran. Dalam bab ini dijelaskan secara lengkap sektor usaha yang memanfaatkan layanan kredit di Unit Simpan Pinjam KUD Mekar. Bagian selanjutnya membahas manfaat dari pengaruh kredit terhadap debiturnya serta manfaat kredit terhadap dunia usaha di Ungaran.

Bab V, merupakan kesimpulan skripsi yang berisi jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan dalam bagian depan skripsi.